

GAGASAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PESANTREN(1970-1980)

Moh. Slamet Untung

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jawa Tengah

E-mail: slamet.untung369@gmail.com

ABSTRACT

The major problem of this article is how Abdurrahman Wahid's ideas on developing pesantren education. It is elaborated into major sub-problems, namely the pesantren existence in the political frame of the New Order in the decades of 1970s and 1980s, Abdurrahman Wahid's view on pesantren, and on the framework of developing pesantren education. This research is designed as qualitative one using hermeneutic and content analysis approaches. The findings of this research show that the phenomena of inability of pesantren in facing the New Order power, the policies of non pro-pesantren regime, and political suppression and systematical marginalization to pesantren done by the New Order regime in the decades of 1970s and 1980s became the factors that opened the way for the emergence of pesantren educational development ideas. Meanwhile, the common manifestations of the stagnant and apprehensive pesantren conditions were the internal factors encountered by pesantren at that time. To change these pesantren conditions, innovative ideas, namely "pesantren dynamicization" was introduced.

Keywords: Abdurrahman Wahid; Dynamicization; Pesantren Development

ABSTRAK

Masalah utama tulisan ini adalah bagaimana gagasan Abdurrahman Wahid tentang pengembangan pendidikan pesantren. Hal ini diuraikan menjadi sub-masalah utama, yaitu keberadaan pesantren dalam kerangka politik Orde Baru dalam dekade 1970-an dan 1980an, pandangan Abdurrahman Wahid tentang pesantren, dan dalam rangka pengembangan pendidikan pesantren. Penelitian ini dirancang secara kualitatif dengan menggunakan

pendekatan analisis hermeneutik dan isi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena ketidakmampuan pesantren dalam menghadapi kekuasaan Orde Baru, kebijakan rezim non pro-pesantren, dan penekanan politik dan marginalisasi sistemik terhadap pesantren yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pada dekade 1970-an dan 1980 menjadi faktor yang membuka jalan bagi kemunculan gagasan pengembangan pendidikan pesantren. Sementara itu, manifestasi umum dari kondisi pesantren yang stagnan dan memprihatinkan adalah faktor internal yang dihadapi pesantren saat itu. Untuk mengubah kondisi pesantren ini, maka ide inovatif, yaitu “dinamika pesantren” diperkenalkan.

Kata kunci: *Abdurrahman Wahid; Dinamisisasi; Pengembangan Pesantren*

A. Pendahuluan

Muktamar NU ke-27 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Asembagus Situbondo Jawa Timur mengantarkan Abdurrahman Wahid tampil pertama kali di puncak kepemimpinan NU. Bagi dia, makna “Kembali ke Khittah NU 1926” antara lain ialah bahwa NU harus memantapkan proyek-proyek pendidikan dan dakwah, sosial, dan ekonomi di atas politik (dalam Lukens-Bulls, 1997: 131).

Seen from this vantage point (an understanding the role of religious scholars), you can see why there have been strong reactions to the emergence of pesantren-based organizations which are political. For example the reaction of Robhithotul Maahidul Islamiyah (RMI) [NU suborganization on pesantren education] toward the formation of The Pesantren Director's Forum (Forum Sillaturohim Pengasuh Pondok Pesantren Wilayah Empat), which openly supports Golkar. RMI feels that their efforts are being disturbed. It is not their role to engage in politics. Politics should be business of political organization. If an NU person wants to engage in politics, they should do so directly and not use NU, or religion in general, for political goals (Wahid dalam Lukens-Bull, 1997: 131).

Melalui NU, Abdurrahman Wahid mengusung gagasan-gagasan *brilliant* termasuk gagasan pengembangan pesantren di tengah pergumulan pemikiran keislaman Indonesia kontemporer. Kelihaiannya meramu tradisi pesantren dengan pemikiran-pemikiran modern memantapkan kedudukannya sebagai juru bicara utama kiai pesantren dan warga NU (Iskandar, 2007: 7). Kelihaiannya itu tidak mungkin dimilikinya jika dia tidak mempunyai pengetahuan dan penghayatan yang mendalam tentang dunia pesantren serta mampu merumuskannya ke dalam tulisan-tulisan

ilmiahnya. Pemikirannya mengenai dunia pesantren ini antara lain terkait dengan gagasan mengenai pengembangan pendidikan pesantren yang mulai digulirkan sejak awal dekade 1970-an. Gagasan tersebut sebenarnya merupakan ajakannya kepada kalangan internal pesantren untuk mengembangkan pesantrennya baik secara kolektif maupun individual, dan dimaksudkan untuk menyatukan visi bagi pihak-pihak di luar pesantren yang memiliki *concern* terhadap problematika kepesantrenan (Wahid, t.t.: 3).

Gagasannya tersebut dapat dipahami dalam rangka memperluas perspektif bersama di kalangan pesantren untuk menghindari *gap* pandangan yang cukup lebar yang terjadi di kalangan pesantren sendiri dalam menghadapi tantangan modernisasi dalam bentuk pembangunan. Menurut Arif (Wawancara, 11 Mei 2014), gagasan Abdurrahman Wahid untuk mengembangkan pesantren dengan mendinamisasikan pesantren merupakan respons atau *counter-act* terhadap modernisasi. Namun demikian, mengembangkan pesantren dengan mendinamisasikan pesantren tersebut bukan semata-mata reaksi pesantren atas serangan modernisasi. Bagi kalangan pesantren, modernisasi tidak berarti harus menggunakan parameter Barat. Secara filosofis dan kultural, kalangan pesantren sesungguhnya telah memiliki parameter sendiri dalam memahami makna kemajuan dan modernisasi.

Abdurrahman Wahid ingin mewartakan parameter-parameter kemajuan dan modernisasi tersebut kepada masyarakat Indonesia menurut kacamata pesantren secara luas khususnya kepada para teknokrat pembangunan yang dikemas melalui gagasannya mengenai pengembangan pesantren. Istilah “pengembangan” merupakan terma yang dipilihnya dalam mengusung gagasannya tentang pengembangan pesantren. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari *background* aktivitasnya pada dekade 1970-dan 1980-an. Pada dekade-dekade tersebut, dia termasuk seorang aktivis LSM (LP3ES, P3M). Salah satu program andalan LSM ketika itu adalah *community development* (pengembangan masyarakat). Istilah “pengembangan” (dalam konteks LSM) adalah pengembangan masyarakat melalui pendekatan keagamaan yang muncul dari konsep *community development* tersebut.

Menurut Arif (Wawancara, 11 Mei 2014; Barton, 2004: 110), ketika Abdurrahman Wahid terlibat secara intensif dalam proyek-proyek LSM tersebut, dia amat *concern* dengan pembangunan dan pengembangan masyarakat. Istilah pembangunan dan pengembangan secara leksikal merupakan makna yang diderivasi dari kata *development*. Namun demikian, tampaknya dia lebih menekankan makna “pengembangan”. Hal ini dapat dipahami mengingat pengembangan masyarakat merupakan *counter discourse* terhadap model pembangunan yang dikembangkan negara. Pengembangan masyarakat merupakan *bottom-up development* yang menjadi penyeimbang bagi *top-down development* yang dikembangkan oleh negara tersebut. Abdurrahman Wahid menjadikan pesantren sebagai modal sosial bagi pengembangan masyarakat, yakni pengembangan masyarakat melalui pesantren. Oleh karena itu, meneliti dan mengkaji secara lebih intensif dan komprehensif terkait gagasan Abdurrahman Wahid tentang pengembangan pesantren ini merupakan sesuatu yang menarik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik (Saenong, 2004: 51) dan pendekatan content analysis. Untuk memahami gagasan Abdurrahman Wahid tentang pengembangan pendidikan pesantren ini, penulis menggunakan teori “pemahaman” dari Gadamer (2010: 350) bahwa pemahaman tidak dianggap sebagai tindakan dari subyektivitas seseorang, tetapi sebagai penempatan seseorang di dalam sebuah proses tradisi, yang di situ masa lalu dan sekarang secara terus-menerus digabungkan. Gadamer (2010: 372) juga menerangkan bahwa pemahaman secara esensial bersifat historis. Hal ini berarti bahwa di dalam sebuah teks dipahami jika ia dipahami dengan cara yang berbeda setiap waktu.

B. Pembahasan

1. Pesantren dan Politik Orde Baru pada Dekade 1970-an dan 1980-an

Pada akhir dekade 1980-an, rezim Orde Baru membakukan semua bentuk sistem dan peraturan pendidikan Indonesia ke dalam *Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Undang-Undang ini memuat asas praktik politik pendidikan rezim Soeharto (lihat *Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional* dalam *Himpunan Lengkap Undang-Undang Sisdiknas dan Sertifikasi*

Guru, 2013: 28). Apabila disimak, sebenarnya UU No. 2 Tahun 1989 mengandung nilai-nilai yang baik dilihat dari segi pendidikan. Namun, di dalam implementasinya dan manajemennya memang cenderung kepada sentralisme. Hasil dari sistem pendidikan yang sentralisme adalah tercerabutnya pendidikan dari kebudayaan. Antara Undang-Undang dengan implementasinya terdapat ketidaksesuaian disebabkan karena pendidikan telah menjadi alat politik penguasa (Tilaar, 2000: 173).

Kesan tradisionalisme lembaga pesantren sehingga tidak menjadi pilihan untuk kemajuan ini dipegang kuat oleh rezim Orde Baru (Riyadi, 2006: 74). Oleh karena itu, rezim Orde Baru memarjinalkan pesantren dalam pembangunan. Bahkan, bukan hanya pesantren yang mendapat perlakuan tidak fair dari rezim Orde Baru pada saat itu. Akan tetapi, umat Islam secara keseluruhan ditempatkan sebagai masyarakat pinggiran “marginal society” yang tidak kebagian kue pembangunan (Masdar Farid Mas’udi, 2011). Pada masa rezim Orde Baru berkuasa, para pemegang kebijakan pemerintah terutama para teknokrat memandang negatif umat Islam termasuk kalangan pesantren. Hal ini dapat dimengerti karena *mind-set* mereka didominasi oleh sekularisme yang meremehkan peran agama dalam kehidupan manusia. Sebagai akibat dari konsep pembangunan bangsa yang demikian ini lahirlah manusia yang rakus, materialistis, dan hedonistis (Rangkuti-Hasibuan, 2002: 110).

Setelah hampir 20 tahun menerapkan model pembangunan pertumbuhan, beberapa LSM mulai menyadari bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam situasi politik dan ekonomi di kawasan pedesaan Indonesia (Fakih, 2010a: 98). Kelahiran LSM di Indonesia sejak akhir 1960-an didorong oleh fakta bahwa kebijakan pembangunanisme oleh pemerintah telah mengakibatkan bencana kemanusiaan dalam kaitannya dengan hak-hak sipil, politik maupun hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Paham pembangunan yang dijalankan pemerintah Orde Baru sesungguhnya merupakan model kapitalisme negara. Pembangunan, dengan demikian merupakan bagian dari perjalanan dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia (Fakih, 2010b: 20-23). Korban kebijakan pembangunanisme Orde Baru adalah kemiskinan rakyat. Salah satu korban dari kebijakan sistem relasi yang tidak adil yang dibangun oleh “negara zaman pembangunanisme” Orde Baru ialah NU dan pesantren.

Salah satu *pressure* politik yang dialami pesantren pada dekade 1970-an ialah program pemerintah untuk melakukan penyeragaman kurikulum madrasah yang umumnya dikelola pesantren. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 52 Tahun 1971, pemerintah Orde Baru memberlakukan kurikulum madrasah secara nasional (dikenal dengan Kurikulum 1973) (Hasan dan Ali, 2003: 54). Untuk membenahi madrasah, pada 1975 pemerintah Orde Baru menggulirkan kebijakan berupa SKB Tiga Menteri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah (Arifin, t.t.: 184). SKB Tiga Menteri ini menurut A. Mukti Ali merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang integral di Indonesia. A. Mukti Ali (1991: 7-8) menyatakan:

Dalam SKB Tiga Menteri itu dinyatakan diantara lain-lain bahwa dalam madrasah mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Dengan itu diharapkan bahwa madrasah dengan jenjang tingkatannya akan memiliki pelajaran umum yang sama dengan standard pengetahuan pada Sekolah Umum dengan jenjang tingkatannya.

Upaya rezim Orde Baru melakukan pembenahan madrasah dapat dipahami dari kepentingan politis pemerintah terhadap madrasah itu sendiri. Pada umumnya madrasah dikelola oleh pesantren. Pembenahan madrasah melalui SKB Tiga Menteri di satu sisi bermanfaat, namun di sisi lain juga berdampak madharat. SKB Tiga Menteri ini memang dapat dianggap sebagai tonggak kunci sejarah modernisasi madrasah. Namun, ternyata kebijakan ini sebagaimana dikatakan As'ad Said Ali (2008: 48) telah mengabaikan sistem pendidikan yang menaungi madrasah itu sendiri, yakni sistem pendidikan pesantren yang sudah mapan. Meskipun pada awalnya muncul resistensi dari pesantren, akan tetapi dalam perkembangannya, dengan sangat terpaksa dan demi menjaga sustainibilitasnya, sebagian pesantren mengadopsi kurikulum madrasah yang dirumuskan oleh Departemen Agama untuk madrasah-madrasahnyanya.

SKB Tiga Menteri tersebut membawa dampak kurang bagus bagi pesantren berupa goyahnya watak mandiri (*self-reliance*) pesantren. Masuknya sistem madrasah di pesantren dengan kurikulum seragam yang disusun oleh rezim Orde Baru telah menimbulkan krisis identitas yang luar biasa di dalam sistem pendidikan pesantren (Wahid (t.t.: 130). Penyeragaman kurikulum madrasah di pesantren juga menyebabkan

terjadinya pergeseran tujuan pendidikan pesantren yang dapat mengubah tujuan sistem pendidikan pesantren secara keseluruhan (Wahid, 2001b: 80).

Kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru yang tidak propesantren di satu sisi justru memicu munculnya pemikiran dan gagasan kreatif tentang pengembangan pendidikan pesantren. Represivitas politik dan marjinalisasi sistemik terhadap pesantren yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pada dekade 1970-an dan 1980-an telah melahirkan gagasan mengenai urgensi pengembangan pendidikan pesantren sebagaimana dilakukan oleh Abdurrahman Wahid. Pada awal Orde Baru, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional dan sekaligus sebagai salah satu komponen pembangunan bangsa diperlakukan diskriminatif secara politis. Meskipun faktanya, pesantren dan politik merupakan dua fenomena kehidupan yang saling terkait.

Pesantrens, through their fragmented approach to social change so far, are naturally an easy prey to the political pulling forces described. It is natural for some pesantren to participate in the endeavors to present and submit alternative concepts or strategies to contending groups. To expect otherwise is not natural. However, pesantren people themselves, and those who cooperate in community development with them, should keep in mind the great danger of doing so since those menouvers would divert energies from their original objectives. One can only hope that the voice of reason is already strong enough among pesantren people to enable them to resist the temptation to meddle in national politics so crassly (Wahid dalam Oepen dan Karcher [eds.], 1988: 35).

Abdurrahman Wahid selanjutnya mengingatkan peran yang harus dimainkan pesantren berkenaan situasi politik Indonesia yang sedang mengalami kekacauan (*turbulence*) disebabkan karena munculnya problem politik berupa suksesi jabatan presiden di masa rezim Orde Baru khususnya pada 1980-an.

The pesantren should remember that politic roles should be differentiated from political institutions. NGOs can play important long-term political roles in transforming the society without themselves becoming political institutions or entering alliances with political institutions. Like mass media and professional associations, NGOs would lose their true political role as soon as they began to cultivate institutional political ambitions. The pesantren generically is a part of the Indonesian NGO tradition, and it is better to stick to that tradition by not allowing itself to be sucked into a volatile situation such as is current at the time of writing (Wahid dalam Oepen dan Karcher [eds.], 1988: 35).

Fenomena ketidakmampuan pesantren dalam menghadapi kekuasaan rezim Orde Baru memunculkan tekad Abdurrahman Wahid untuk mengangkat eksistensi pesantren dalam publik yang lebih luas. Yang dilakukan dia kemudian adalah menuangkan gagasan tentang pengembangan pesantren tersebut lewat serangkaian esai mengenai dinamika kehidupan pesantren. Melalui esai-esai itu, dia berbicara kepada kalangan kelas menengah bahwa dunia pesantren bukanlah dunia statis yang sering diklaim antiperubahan (Wahid, 2001a: 141). Potensi yang dimiliki pesantren itu dapat pula diubah menjadi agen pembangunan. Namun, untuk mencapai tujuan ini menurut Abdurrahman Wahid diperlukan kemauan baik dari pemerintah untuk memotivasi terjadinya perubahan di pesantren.

Kalau pemerintah dapat mendorong dan membimbing perubahan pesantren dari semacam institusi sosial yang relatif statis menjadi agen pembangunan yang bergerak aktif di pedesaan, maka “dengan sekali pukul” pemerintah akan dapat mencapai dua tujuan sekaligus: menetralsir pengaruh kekuatan yang tidak seluruhnya menerima rencana pemerintah di dalam pelaksanaan pembangunan, dan mendapatkan partner yang sangat berharga dalam lingkungan hidup pedesaan... (Wahid, 2001a: 141).

Potensi pesantren seperti inilah yang kemudian dilirik oleh LP3ES. LSM yang digerakkan mantan tokoh-tokoh aktivis mahasiswa itu kemudian melihat arti strategis menjadikan pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat pedesaan. Untuk melaksanakan program ini, keterlibatan Abdurrahman Wahid tidak bisa disepelekan. Program pengembangan pesantren yang dilaksanakan LP3ES ini hanya berumur satu dekade. Kemudian proyek pengembangan pesantren tersebut dilanjutkan oleh P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, berdiri pada 1983). P3M tidak hanya menumbuhkan pemberdayaan pesantren, akan tetapi juga area yang selama ini menjadi monopoli pesantren, seperti analisis kitab kuning, kepemimpinan di pesantren, tradisi keilmuan di pesantren, dan isu sensitif lainnya. Upaya-upaya seperti itu tentu saja menggambarkan adanya pergulatan pemikiran dinamis di dalam pesantren. Eksistensi pesantren yang sudah mapan dipersoalkan justru oleh kalangan pesantren sendiri. Abdurrahman Wahid mempersoalkan eksistensi pesantren yang tidak mau berubah. Sikap selalu mengikuti

pandangan generasi masa lalu tanpa berpikir mendalam menjadi sebab adanya ketidakdinamisan di pesantren (Ahmad, 2010: 150).

Untuk merubah kondisi pesantren tersebut, Abdurrahman Wahid menawarkan gagasan pengembangan pendidikan pesantren melalui dinamisasi pesantren. Tawarannya itu merupakan bentuk dialektika ketidakmampuan pesantren di hadapan kekuasaan negara. Dia tidak sekadar membela Islam tradisional, tetapi juga mengkritik sistem pendidikan pesantren yang dinilainya belum mampu mengintegrasikan antara pengetahuan agama dan nonagama. Kegagalan memahami dan kemudian memenuhi kebutuhan ini berarti semakin tertinggalnya pesantren dalam percaturan budaya bangsa Indonesia di masa depan.

2. Pandangan Abdurrahman Wahid mengenai Pesantren

Melalui makalah yang berjudul "Principles of Pesantren Education", dia memaparkan pandangannya tentang pesantren.

Technically, a pesantren is "a place where santri live". This phrase denotes the most important feature of pesantren, i.e. a total education environment in the fullest sense. A pesantren is similar to a military academy or a cloister in the sense that those taking part in it experience an exposure to totality. Compared to the partial educational environment offered by the present-day Indonesian public school system, which acts as the 'general education structure' of the nation, the pesantren is a unique culture in it... (Wahid dalam Oepen dan Karcher [eds.], 1988: 197).

Berdasarkan kutipan di atas, tampak bahwa dia lebih menekankan pengertian pesantren pada ciri yang paling utama dari pesantren itu sendiri, yakni lingkungan pendidikan yang total. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan distingsi antara lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan sekolah yang menjadi model dari kultur pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya dewasa ini.

Kajian seksama terhadap pandangan Abdurrahman Wahid tentang pesantren menegaskan bahwa pesantren memiliki fungsi ganda; fungsi utama pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan fungsi tambahan pesantren sebagai sarana informasi. Fungsi tambahan pesantren ini pada dasarnya menjadi bagian tak terpisahkan dari fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Dengan kata lain, kedua fungsi pesantren tersebut bersifat *integrated* (Wahid, 2001b: 157).

Berdasarkan pandangannya tentang pesantren di atas, maka dapat ditegaskan di sini bahwa pesantren dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni dari fungsi pendidikan dan fungsi kemasyarakatan (Wahid, t.t.: 126). Sebuah gambaran yang jelas dapat diperoleh untuk mengidentifikasi kekhasan pesantren terkait dengan peran subkulturnya dalam masyarakat. Pesantren memiliki kelengkapan nilai, bangunan sosial, dan tujuan-tujuannya sendiri sehingga pesantren menjadi dunia tersendiri yang berbeda dari dunia di luarnya. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang sistemik, pesantren memiliki tujuan, nilai dan berbagai unsur yang bekerja secara terpadu satu sama lain dan tidak terpisahkan.

Sebagai lembaga pendidikan Islam pesantren memiliki asal-usul tradisi keilmuan yang dapat dilacak pada perkembangan ilmu-ilmu keislaman sejak ilmu-ilmu keislaman itu lahir dalam masyarakat Islam untuk pertama kali (Wahid, 2001b: 158). Selanjutnya Abdurrahman Wahid menjelaskan pengaruh Hellenisme terhadap tradisi keilmuan Islam di dalam perkembangan sejarahnya yang menjadi mata rantai dari asal-usul tradisi keilmuan di pesantren (Wahid, 2001b: 159). Ketika kota Jundishapur sebagai pusat ilmu pengetahuan kedokteran Hellenistik menyerah kepada tentara Islam (tahun 636), Akademi Jundishapur dibiarkan tetap hidup sehingga kota tersebut tetap menjadi pusat ilmu pengetahuan bahkan setelah pemerintahan Baghdad memboyong ahli-ahlinya dan tradisi intelektualnya ke kota Islam yang baru (Nakosteen, 2003: 26). Unsur-unsur tradisi Hellenisme Yunani yang sesuai dengan semangat universalisme Islam diserap sehingga menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam pada abad ke-7 M sampai ke-13 M yang turut mewarnai peradaban Islam. Tradisi keilmuan Islam tersebut menjadi rangkaian berkesinambungan dari asal-usul tradisi keilmuan di pesantren.

Selanjutnya Abdurrahman Wahid menjelaskan sumber-sumber keilmuan di pesantren yang bersumber pada dua gelombang, yaitu gelombang pengetahuan keislaman yang datang ke Nusantara dalam abad ke-13 Masehi dan gelombang ketika para ulama kawasan Nusantara menggali ilmu di Semenanjung Arabia, khususnya di Makah dan kembali setelah itu ke tanah air untuk mendirikan pesantren-pesantren besar (Wahid, 2001b: 163). Penyebaran Islam di kalangan rakyat Nusantara, menurut A.H. Johns (dalam Azra, 1999: 32) dilakukan oleh para sufi

pengembara. Mereka berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Nusantara sejak abad ke-13. Oleh karena itu, proses islamisasi di Nusantara khususnya di Jawa bisa dilacak melalui sejarah perkembangan tasawuf Islam. Perkembangan tasawuf Jawa sebenarnya dipengaruhi oleh para guru sufi, seperti Abu Yazid al-Busthami (wafat 875 M), Husein Manshur al-Hallaj (wafat 922 M), Imam al-Ghazali (wafat 1111 M), Ibn Arabi (wafat 1240 M), Muhammad ibn Fadhlilah (wafat 1620 M) di Gujarat India (Purwadi 2007: 1).

Gelombang kedua dari sumber keilmuan Islam di pesantren pada abad ke-19 menyebabkan pesantren mengalami peningkatan fiqh-sufistik di satu pihak dan pendalaman ilmu fiqh itu sendiri melalui bermacam alat bantu di pihak lain. Namun perlu dicatat, bahwa para ulama pesantren yang berorientasi fiqh, juga tetap berpegang pada akhlak sufistik. Hal inilah yang merupakan manifestasi kombinasi antara kedua jenis keilmuan yang telah sampai ke Nusantara melalui perjalanan waktu tujuh abad lamanya yang menjadi sumber asal-usul tradisi keilmuan Islam di pesantren.

Menurut Abdurrahman Wahid (dalam Mochtar, 2009: 55), tradisi keilmuan yang fiqh-sufistik yang didukung penguasaan ilmu-ilmu instrumenal, termasuk ilmu-ilmu adab (humanistik) dibentuk oleh kitab kuning. Tanpa kitab kuning dalam pengertian yang lebih kompleks, tradisi intelektual di Indonesia agaknya tidak akan bisa keluar dari kemelut sufi-ekstrim dan fiqh-ekstrim. Abdurrahman Wahid berpendapat, kitab kuning yang telah dipakai selama berabad-abad sebagai rujukan umum di pesantren merupakan salah satu elemen yang membentuk pesantren sebagai sebuah subkultur (Wahid dalam Wahid, Suwendi, dan Zuhri [eds.], 1999: 14).

Tradisi akademik pesantren tidak dapat dipisahkan dari kitab kuning yang menjadi *text books, references*, dan kurikulum dalam sistem pendidikan pesantren (Mochtar, 2009: 37). Berkenaan dengan kurikulum pesantren, Abdurrahman Wahid menjelaskan urgensi standarisasi kurikulum pesantren, signifikansi perumusan model-model kurikulum pesantren, dan rumusan kurikulum pesantren. Abdurrahman Wahid menggunakan istilah “penyeragaman” kurikulum untuk menjelaskan urgensi standarisasi kurikulum pesantren (Wahid, t.t.: 147).

Standarisasi kurikulum bagi pesantren menjadi kebutuhan yang mendesak. Pengembangan pesantren mustahil dapat direncanakan dan

dilakukan manakala pesantren tidak memiliki standar tertentu dalam kurikulumnya. Eksistensi kurikulum baku menjadi kerangka pijakan bagi pesantren dalam menyediakan buku-buku pelajaran yang standar, pengembangan program sektoral pesantren, seperti kepramukaan dan sebagainya, dan pemberdayaan fungsi-fungsi kemasyarakatan pesantren (Wahid, t.t.: 147). Sebagai lembaga pendidikan Islam, model kurikulum yang digunakan pesantren menjadi barometer kualitas pelaksanaan pendidikannya. Pengembangan pesantren tidak bisa mengabaikan komponen pendidikan ini.

Keperluan pembuatan model-model kurikulum itu adalah untuk menyediakan tingkatan ilmiah minimal bagi pengetahuan agama di pondok pesantren. Dengan terciptanya tingkatan minimal itu, pondok pesantren bersangkutan dapat memasukkan unsur-unsur pendidikan non-agama kedalam kurikulumnya, tanpa membahayakan kelestarian tugas pondok pesantren sebagai pengemban ilmu-ilmu agama yang dilandasi oleh ketiga unsur iman, Islam dan ihsan ... (Wahid, t.t.: 148).

Kurikulum standard pesantren yang diperkenalkan Abdurrahman Wahid dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan penyusunan kurikulum dapat dijadikan sebagai model dalam merumuskan kurikulum pendidikan di pesantren.

1. pemberian waktu terbanyak dilakukan kepada unsur nahwu-sharaf dan fiqih, karena kedua unsur ini masih memerlukan ulangan (tikrar), setidaknya-tidaknya untuk separoh dari masa berlakunya kurikulum.
2. mata pelajaran lainnya hanya diberikan selama setahun tanpa diulang pada tahun-tahun berikutnya.
3. kalau diperlukan, pada tahun-tahun terakhir dapat diberikan buku-buku utama (kutubul muthowwalah) seperti Shahih Bukhari atau Muslim untuk hadits atau Ihya' untuk tashawuf. Dalam keadaan demikian pejalaran setahun hanya dipusatkan pada penguasaan buku utama tersebut yang diajarkan selama beberapa kali dalam sehari hingga selesai secara keseluruhan dalam satu tahun saja (Wahid, t.t.: 150).

Apabila organisasi kurikulum dipandang sebagai suatu cara untuk menyusun bahan-bahan atau pengalaman belajar yang dicapai (Ali, 1985: 105) dapat dipahami dengan baik, maka model kurikulum pendidikan

pesantren yang dirumuskan Abdurrahman Wahid di atas pada level tertentu dapat diterima karena tidak bertentangan dengan teori pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata (2000: 102) dan Nasution (1993: 118), setiap bentuk organisasi kurikulum minimal memuat materi pelajaran dan proses atau sistem penyampaiannya.

Rumusan organisasi kurikulum yang dibuat Abdurrahman Wahid juga mendeskripsikan ruang lingkup (*scope*) kurikulum atau materi pelajaran yang harus dicakup, urutan (*sequence*), dan distribusi waktu (Wahid, t.t.: 150).

Tabel 1.

Rumusan Kurikulum Pendidikan Pesantren Menurut
AbdurrahmanWahid

Waktu	Ruang Lingkup	Urutan	Durasi Waktu	Keterangan
Tahun I	Nahwu, Fiqh, Sharaf, Tauhid	Nahwu Fiqh Sharaf Tauhid	1 Tahun	Keempat mata pelajaran di tahun pertama ini diberikan selama 1 tahun
Tahun II	Nahwu, Fiqh, Sharaf, Tauhid	Nahwu Fiqh Sharaf Tauhid	1 Tahun	Keempat mata pelajaran di tahun kedua ini diberikan selama 1 tahun sebagai kelanjutan di tahun pertama
Tahun III	Nahwu, Fiqh, Sharaf, Tauhid	Nahwu Fiqh Sharaf Tauhid	1 Tahun	Keempat mata pelajaran di tahun ketiga ini diberikan selama 1 tahun sebagai kelanjutan di tahun kedua
Tahun IV	Fiqh, Balaghah, Tafsir	Fiqh Balaghah Tafsir	1 Tahun	Ketiga mata pelajaran di tahun keempat ini diberikan selama 1 tahun dengan fiqh sebagai kelanjutan di tahun ketiga
Tahun V	Mantiq, Ushul Fiqh, Hadis	Mantiq Ushul Fiqh Hadis	1 Tahun	Ketiga mata pelajaran di tahun kelima ini diberikan selama 1 tahun yang berbeda sama sekali dari tahun-tahun sebelumnya
Tahun VI	Hadis, Tasawuf	Hadis Tasawuf	1 Tahun	Kedua mata pelajaran di tahun keenam ini diberikan selama 1 tahun sebagai kelanjutan di tahun kelima dengan ditambah mata pelajaran tasawuf

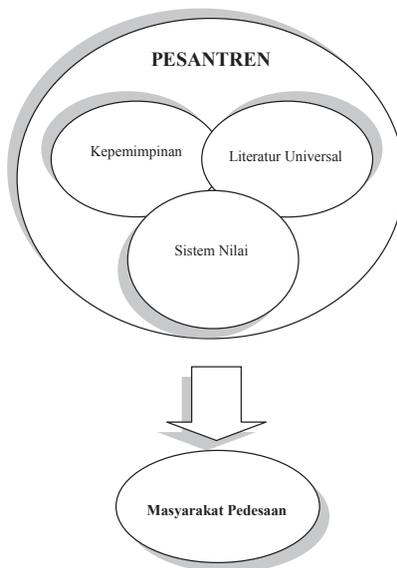
Selain sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren juga sebagai subkultur. Untuk melihat kehidupan pesantren sebagai subkultur dapat

dipahami dari tulisan Abdurrahman Wahid yang lain berjudul “Pesantren sebagai Subkultur” dicermati lebih seksama.

Pesantren adalah sebuah kehidupan yang unik, sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran lahiriahnya. Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya... Dalam lingkungan fisik yang demikian ini, diciptakan semacam cara kehidupan yang memiliki sifat dan ciri tersendiri dimulai dengan jadwal kegiatan yang memang menyimpang dari pengertian rutin kegiatan masyarakat sekitarnya... (Wahid dalam Rahardjo [ed.], 1983: 40).

Menurutnya, sebuah kultur dapat disebut sebagai subkultur manakala mempunyai tiga kriteria, yaitu keunikan dalam cara hidup (*uniqueness of way of life*), pandangan hidup yang khas (*uniqueness of worldview*), dan hirarki kekuasaan intern yang ditaati sepenuhnya (*authority hierarchy obeyed absolutely*). Kriteria-kriteria ini pula yang ditemukan oleh Mahbub Djunaedi dalam dunia kaum *hippies* yang menganut *life pattern, mores*, dan *internal authority* (Wahid dalam Rahardjo [ed.], 1983: 43).

Keterkaitan antara elemen-elemen dasar pesantren yang membentuk pesantren sebagai subkultur dan perannya dalam mendukung pembangunan masyarakat pedesaan di mana kebanyakan pesantren berada menurut penulis dapat diilustrasikan melalui Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Keterkaitan Hubungan Antarelelemen Dasar Pesantren dan Perannya Bagi Pembangunan Pedesaan

Pesantren menjadi potensi bangsa dan masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat pedesaan) yang memiliki etos tersendiri yang dikenal dengan nama “etos pesantren”. Menurut KH. Tolchah Hasan (Wawancara, 20 Agustus 2011), yang dimaksud dengan “etos pesantren” ialah suatu pola hidup yang di dalamnya memuat unsur-unsur religius, egaliter, populis, dan etis-humanis. Kehidupan pesantren merefleksikan keteladanan religius yang dapat dilihat dari perilaku kiai sebagai sumber nilai, bukan sekedar sebagai sumber ilmu pengetahuan semata. Kiai adalah figur panutan. Kitab kuning di pesantren merupakan standar nilai pesantren (bukan standar keilmuan pesantren belaka). Secara akumulatif unsur-unsur tersebut membentuk pesantren sebagai sebuah subkultur.

3. Kerangka Pengembangan Pendidikan Pesantren menurut Abdurrahman Wahid

Untuk mengembangkan pendidikan pesantren, Abdurrahman Wahid menawarkan gagasan dinamisasi pesantren, bukan modernisasi pesantren. Menurutnya yang dimaksud kata “dinamisasi” adalah perubahan ke arah penyempurnaan dengan bertumpu pada sikap dan materi yang telah ada sebagai dasar. Menurutnya, “dinamisasi” sebenarnya meliputi dua proses, yakni memanfaatkan kembali nilai-nilai hidup positif yang sudah ada di satu sisi, dan mengganti nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik di sisi lain. Proses penggantian nilai-nilai lama dinamakan “modernisasi”. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pengertian “modernisasi” sebenarnya telah tercakup dalam kata “dinamisasi” (Wahid, t.t.: 52).

Kata “dinamisasi” menyiratkan dua aspek penting, yakni keberlangsungan (*continuity*) dan perubahan (*change*). Sebagai seorang yang teguh memegang tradisi, Abdurrahman Wahid tidak menghendaki perubahan yang menyebabkan terjadinya diskontinuitas tradisi sebagaimana dalam modernisasi.

Modernisasi dihadapkan kepada tradisi, perubahan kepada *status quo*, dinamika pada keadaan statis. Upaya modernisasi dengan sendirinya adalah pengikisan sikap tradisional, ini adalah semboyan semua pemrakarsa modernisasi tanpa kecuali, termasuk di negeri kita di akhir dasawarsa enam puluhan dan awal dasawarsa tujuh puluhan (Wahid dalam Horikoshi, 1987: xi).

Menurut kutipan ini dapat dipahami mengapa dia menggunakan konsep “dinamisasi” bukan “modernisasi” dalam mengupayakan perubahan pesantren yang dikehendaki. Modernisasi membersihkan semua jenis tatanan sosial tradisional. Sedangkan “dinamisasi” justru menetapkan adanya kontinuitas antara hal-hal yang baru (modern) dengan tradisi (hal-hal yang lama dalam pengertian tidak semata-mata mengganti dan meninggalkan segala tradisi). Dia mengkritik upaya melakukan modernisasi yang notabene merupakan konsep dari Barat atas konsep pendidikan nasional yang tidak memahamai aspek-aspek budaya bangsa sendiri.

...Kalau kita secara serampangan menerapkan konsep-konsep budaya orang Barat, hasilnya adalah kita akan kehilangan sesuatu yang besar tentang konsep budaya kita sendiri di masa lampau. Konsep inilah yang membentuk pandangan hidup generasi lampau dan generasi sekarang dari bangsa kita yang sadar. Konsep budaya Barat yang materialistik, karena ukuran-ukuran yang digunakan hanya didasarkan pada capaian materialistik dari filsafat positivisme yang dibawakan oleh tokoh pendidik Amerika Serikat, John Dewey, jelas menunjukkan hal ini. Dua konsep budaya/pendidikan tersebut menunjukkan kepada kita perkembangan yang tidak simetris dalam proses modernisasi (Wahid, 2010e: 50).

Sesuatu yang diinginkan Abdurrahman Wahid dalam melihat perubahan budaya/pendidikan adalah tidak dengan menggunakan kacamata modernisasi yang mengabaikan fakta sejarah bangsa sendiri, tetapi dengan menggunakan kacamata “dinamisasi”. Secara luas, terma “dinamisasi” ini dipakai olehnya untuk merujuk proses di mana ajaran-ajaran Islam ditafsirkan kembali (proses ijtihad) sesuai tuntutan-tuntutan masyarakat dalam merespons modernitas. Konsep “dinamisasi” ini juga digunakan sebagai usaha konstruktif atas ketidakmampuan pesantren dalam menghadapi modernisasi.

Kerangka pengembangan pesantren menurut Abdurrahman Wahid (2001b: 146) diletakkan pada kerangka teologis dan kerangka strategis. Menurut kerangka teologis, kerangka pengembangan pesantren dimaksudkan untuk menciptakan teori sosial Islam yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat (Wahid, 2001b: 148). Keseimbangan ini pada dataran teologis menurut komentar Arif (2009: 178) terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid di atas membutuhkan *Rukun Sosial* yang menghubungkan antara keyakinan

individu dalam *Rukun Iman* dengan etik sosial yang terdapat di dalam *Rukun Islam* (lihat Wahid, 2001b: 148-149).

Menurut Abdurrahman Wahid (2001b: 146-147), gagasan pengembangan pesantren bagi pengembangan masyarakat harus memiliki dasar-dasar pranata dari kehidupan itu sendiri karena secara teoritik masalah kehidupan tidak dapat dipisahkan dari teologi. Karakteristik kehidupan dan cara pemanfaatan kekuasaan merupakan dua komponen utama mengenai pengaturan masyarakat dalam pandangan Islam di mana dasar persamaan, keadilan, dan demokrasi menjadi inti ajarannya.

Pada dekade akhir 1970-an, proyek-proyek pengembangan pesantren telah dilakukan. Namun demikian, menurut Abdurrahman Wahid hal itu secara keseluruhan telah merubah arah perkembangan kehidupan pesantren sendiri dari *khittah* yang sejak semula telah ditempuh secara umum. Proyek-proyek tersebut mengacu kepada pola-pola pengembangan pesantren, menurut dia dapat diklasifikasikan menjadi tiga pola pengembangan (Wahid, t.t.: 157). Pertama adalah pola pendidikan keterampilan yang ditawarkan dan dikelola oleh Departemen Agama. Pola pengembangan ini diperkenalkan oleh mantan Menteri Agama H.A. Mukti Ali.

Mengenai pendidikan keterampilan di pesantren ini, Abdurrahman Wahid menyatakan:

Pendidikan keterampilan ini sebagaimana disebutkan di atas, menjadi bagian dari kurikulum yang diwajibkan oleh Pemerintah bagi sekolah-sekolah agama yang ingin memperoleh persamaan dengan sekolah-sekolah non-agama seperti SMP dan SMA. Jadi, di satu pihak ia dapat digunakan sebagai pendidikan pelengkap yang bersifat ekstra-kurikuler dan non-formal, dan di pihak lain ia menjadi bagian dari pendidikan formal melalui kurikulum wajib (Wahid, t.t.: 160).

Dia berpendapat bahwa satu-satunya aspek proyek keterampilan yang memiliki kemungkinan paling besar untuk diterima oleh kalangan pesantren adalah koperasi. Hal ini dapat dipahami mengingat koperasi merupakan proyek keterampilan yang tidak memiliki watak tambal sulam yang menjadi kelemahan pokok proyek keterampilan di pesantren (Wahid, 2001b: 83). Menurut penulis, gagasan Abdurrahman Wahid mengenai koperasi di pesantren ini memperoleh respons luas dari pemerintah maupun lembaga-lembaga perekonomian di luar pemerintah melalui

penerbitan SKB Menteri, keputusan/kesepakatan bersama dan naskah kerjasama tentang koperasi di pesantren yang menjadi dasar hukum pengembangan usaha koperasi di pondok pesantren (Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010: 8-9). Hal ini menunjukkan bahwa gagasan Abdurrahman Wahid tersebut penting dan bermanfaat tidak saja untuk pengembangan pesantren sendiri tetapi juga untuk pengembangan masyarakat di luar pesantren.

Pola pengembangan pesantren kedua menurut Abdurrahman Wahid adalah yang dirintis dan diprakarsai oleh LP3ES. Pada tahun 1970-an, Departemen Agama bekerja sama dengan Departemen Pertanian merintis proyek agrobisnis di pedesaan. Langkah ini diikuti dengan keterlibatan LSM, seperti LP3ES (Lembaga Pengkajian Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial). Menurut Abdurrahman Wahid, ide dasar program pengembangan pesantren yang dilakukan oleh LP3ES ialah mendidik sebagian santri untuk menjadi tenaga pengembangan masyarakat (*change agents*) yang mampu mengetahui kebutuhan pokok masyarakat, menggali sumber-sumber alam dan manusiawi yang dapat dipakai untuk memenuhinya, dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berpikir membangun masyarakat pedesaan dalam pola pengembangan yang integral. Program ini lebih mudah diterima oleh kalangan pesantren dibandingkan dengan program yang diprakarsai oleh pemerintah.

Pola pengembangan ketiga menurut Abdurrahman Wahid ialah pola pengembangan sporadis di beberapa pesantren utama dalam bentuk tiga kegiatan pokok. Bentuk pertama adalah pengembangan berupa pendirian sekolah-sekolah nonagama (seperti SMP dan SMA), selain sekolah-sekolah agama tradisional yang sudah ada di pesantren. Sekolah-sekolah nonagama ini telah didirikan di Pesantren Paiton Krakasan Probolinggo, Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Pesantren Tebuireng dan Pesantren Rejoso Jombang. Abdurrahman Wahid (2001b: 50) berpendapat, mendirikan sekolah nonagama (“sekolah umum”) di pesantren merupakan solusi langsung yang bisa diambil pemerintah dalam mendirikan sekolah lebih banyak sebagai pemecahan masalah yang sedang melanda dunia pendidikan Indonesia pada dekade 1970-an.

Bentuk pola pengembangan pesantren secara sporadis kedua dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum campuran “agama dan

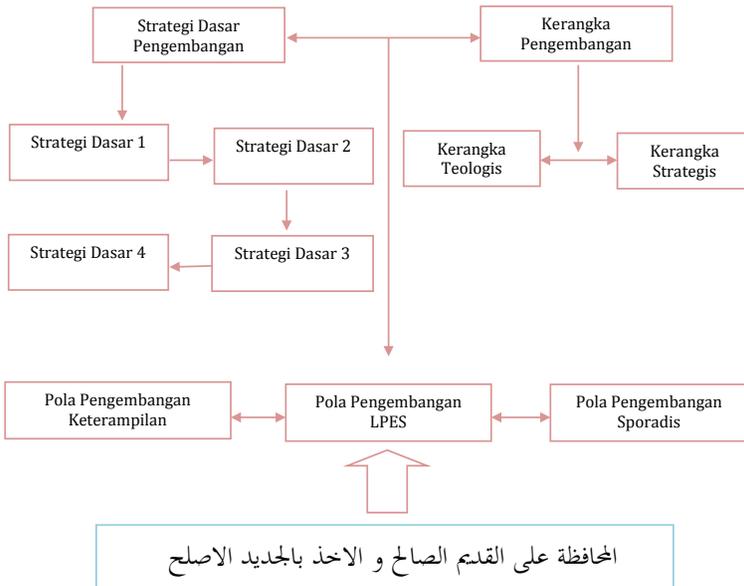
umum” yang dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi berupa fakultas-fakultas agama, seperti Universitas Nahdlatul Ulama Ibrahimy (UNNIB, didirikan pada 14 Maret 1968 di Pesantren Salafiyah Syaifiyah Sukorejo Situbondo) yang membuka Fakultas Syari’ah (Hasan [ed.], 2009: 59). Terakhir, bentuk pola pengembangan pesantren secara sporadis ketiga berupa pengembangan pesantren yang “menyimpang” dari kehidupan pesantren yang telah ada selama ini. Pola pengembangan seperti ini dapat dipahami dari kemunculan beberapa Pondok Karya Pembangunan yang dikelola pemda setempat atau ormas lainnya. Menurut Abdurrahman Wahid (t.t.: 159), pola pengembangan pesantren ini tidak sesuai dengan pola umum pendirian pesantren.

Abdurrahman Wahid memilih model pengembangan pesantren transformatif LP3ES. Model pengembangan pesantren yang diusung oleh LP3ES ini menekankan pada pembentukan pesantren sebagai *agent of change* bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini merupakan langkah strategis yang berangkat dari potensi transformatif pesantren dalam mengupayakan pendampingan masyarakat. Abdurrahman Wahid mengkritik dua model pendekatan pengembangan pesantren yang difokuskan kepada pendidikan keterampilan dan pengembangan pesantren sporadis. Keduanya dianggap berhenti pada tataran teknis (percampuran kurikulum agama dan umum maupun pendidikan keterampilan yang menempatkan santri sebagai obyek “peradaban teknis” dari pembangunan). Kedua model tersebut bergerak tanpa menyadari sistem nilai yang bersifat keagamaan. Pada *point* inilah model pengembangan LP3ES menutupi kekurangan tersebut. Orientasi pengembangan partisipasi masyarakat tidak bertentangan dengan motif keagamaan dan semangat pengabdian komunitas santri.

Pengembangan pesantren menurutnya tidak berarti pengembangan pesantren yang mencerabut akar tradisinya. Tradisi-tradisi kepesantrenan tetap bisa bertahan karena yang dibutuhkan dalam proses transformasi ini bukan penghancuran tradisi melainkan memerangi sikap tradisional yang membela *status quo* tanpa *reserve*. Atas prinsip ini, maka meminjam istilah Kiai Sahal Mahfudh pengembangan pesantren diibaratkan sekedar “memakai baju baru” bukannya mengubah eksistensinya (Zubaedi, 2009: 289). Menurut Zubaedi (2009: 290) perubahan sambil memelihara

kesinambungan masa lalu mungkin lebih konstruktif daripada perubahan radikal. Hal ini karena perubahan radikal atau drastis biasanya akan lebih banyak merusak sistem masyarakat.

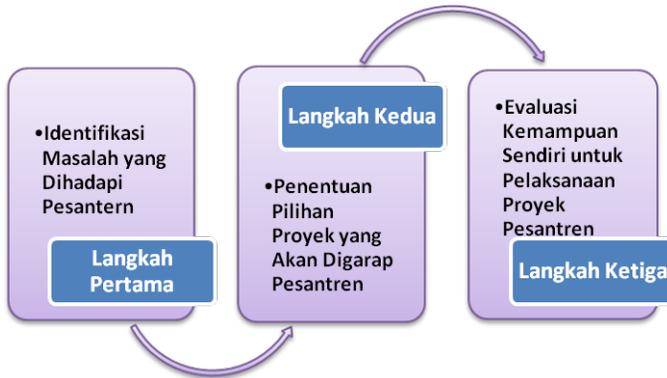
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tentang Kerangka Pengembangan Pesantren menurut Abdurrahman Wahid di atas, penulis dapat mengilustrasikan melalui Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Kerangka Umum Pengembangan Pesantren Menurut Abdurrahman Wahid

Berdasarkan prinsip pengembangan di atas, maka perbaikan kondisi lembaga pesantren dengan memperhatikan strategi dasarnya menuntut pemilihan proyek penggarapan yang selektif sebagai langkah awal dari proses dinamisasi pesantren. Yang dimaksud proyek selektif menurut Abdurrahman Wahid (t.t.: 57) adalah proyek yang sangat terbatas baik dari segi cakupannya maupun biayanya. Konsep penggarapan proyek tersebut dikelompokkan menurut urgensi penggarapannya.

Berdasarkan keterangan Abdurrahman Wahid mengenai langkah kerja penggarapan proyek selektif dalam rangka perbaikan dan pengembangan pesantren di atas, penulis dapat mengilustrasikan melalui Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Langkah Kerja Penggarapan Proyek Selektif Perbaikan/Pengembangan Pesantren Menurut Abdurrahman Wahid

Menurut Abdurrahman Wahid, perubahan pesantren merupakan suatu keniscayaan dengan tetap mempertahankan spirit warisan budaya masa lalu. Dia berpendapat bahwa sebagai gagasan proses dinamisasi pesantren membutuhkan landasan pengembangannya.

Prasyarat utama bagi suatu proses dinamisasi yang berluas-lingkup dan dalam, adalah rekonstruksi bahan-bahan pengajaran ilmu-ilmu agama dalam skala besar-besaran. Baik kitab-kitab kuno maupun buku-buku pelajaran “modern” ala Mahmud Junus dan Hasbi Ash-Shiddieqi, telah kehilangan daya pendorong untuk mengembangkan rasa kesejarahan (*sense of belonging*) dalam beragama. Dari tingkatan dasar hingga perguruan tinggi, para santri disuapi dengan kaidah-kaidah yang sudah tidak mampu mereka cerna lagi. Penguasaan atas kaidah-kaidah itu lalu menjadi masinal, tidak memperlihatkan watak berkembang lagi. Inilah yang justru harus dibuat rekonstruksinya, dengan tetap tidak meninggalkan pokok-pokok ajaran keagamaan yang kita warisi selama ini. Tradisionalisme yang masak adalah jauh lebih baik daripada sikap pseudo-modernisme yang dangkal (Wahid, t.t.: 61).

Berkenaan dengan proses dinamisasi pesantren, masalah kepemimpinan kiai dan literatur universal tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai pesantren yang unik.

Elemen dasar ketiga dari pesantren adalah sistem nilainya yang unik. Berdasar pada ketaatan terhadap ajaran Islam dalam praktik sesungguhnya, sistem nilai ini tidak dapat dipisahkan dari elemen-elemen dasar lainnya, yaitu kepemimpinan kiai dan literatur universal yang digunakan oleh pesantren. Pengundangan ajaran-ajaran Islam secara total dalam praktik kehidupan sehari-hari baik oleh para kiai dan para santri menjadi legitimasi, baik bagi kepemimpinan kiai dan penggunaan

literatur universal tadi hingga sekarang. Literatur yang menjadi sumber pengambilan nilai-nilai dan kepemimpinan kiai sebagai model bagi penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata merupakan arus utama dari sistem nilai ini (Wahid, 2007a: 142).

Dia berpendapat bahwa kedudukan kiai sebagai pemimpin pesantren yang memiliki otoritas mutlak di pesantren merupakan persoalan krusial yang perlu dikaji ulang (Wahid, t.t.: 60-61). Kepemimpinan pendidikan dalam dunia pesantren apabila dipahami dalam konteks manajemen pendidikan, maka ia tidak dapat dipisahkan dari tema penting pendidikan/pengajaran. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan dipandang sebagai upaya membangun sebuah kultur pengajaran/pembelajaran yang kondusif. Kepemimpinan pendidikan mencakup manajemen kurikulum dan pengajaran yang meliputi organisasi kelompok murid dan alokasi waktu, dan juga menstimulasi pengembangan kurikulum; pengawasan terhadap pengajaran; pemantauan kemajuan murid; dan penciptaan iklim pengajaran yang positif (Bush dan Coleman, 2010: 79, 81-82).

Menurut Abdurrahman Wahid (t.t.: 175), pesantren sebenarnya membutuhkan model kepemimpinan yang lebih direncanakan dan dipersiapkan, yakni model kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan kontemporer dan masa depan. Dengan kata lain, kepemimpinan pesantren ke depan ialah kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan antara kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan yang direncanakan dan dipersiapkan. Gaya kepemimpinan seperti ini memiliki “karisma” *skill* manajerial yang tangguh, bukan karisma alamiah semata.

Penulis berpendapat bahwa Abdurrahman Wahid ingin menghilangkan dikotomi asal-usul kepemimpinan pesantren dengan memadukan teori kepemimpinan “pemimpin dilahirkan” (*leaders are born*) dan teori kepemimpinan “pemimpin dibentuk” (*leaders are made*). Betapa pun seseorang memiliki bakat besar menjadi pemimpin, apabila ia tidak memiliki kesempatan menerapkan bakat tersebut serta tidak didukung oleh pengetahuan teoritikal, mungkin saja orang tersebut menjadi pemimpin, tetapi ia tidak menjadi pemimpin yang efektif. Bakat hanyalah modal. Modal yang tidak berkembang, maka lambat laun akan berkurang, bahkan habis. Bakat kepemimpinan sebagai modal berorganisasi yang tidak dikembangkan akan kehilangan maknanya secara perlahan-lahan.

Sebaliknya, tanpa bakat yang dimiliki seseorang bisa saja mengikuti berbagai program pendidikan dan latihan kepemimpinan sehingga menguasai berbagai teori kepemimpinan. Akan tetapi, hal itu tetap tidak menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang efektif. Karena modal dasar berupa bakat tidak dimilikinya. Dia hanya mampu menguasai berbagai teori kepemimpinan, akan tetapi tidak mampu menerapkannya dalam praktik.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan tradisional sejak masa paling awal pertumbuhannya. Dengan bertumpu pada literatur tradisional, pendidikan tradisional pesantren mampu menciptakan sikap hidup universal yang menjadi pedoman seluruh komunitas pesantren (Wahid, t.t.: 74). Sikap hidup kesantrian dibentuk melalui pendidikan tradisional di pesantren yang bersumber dari literatur universal (disebut kitab kuning). Kitab kuning merupakan kurikulum (Winch dan Gingell, 1999: 53) di pesantren. Menurut Abdurrahman Wahid, karakteristik kurikulum pesantren memperlihatkan pola yang tetap; (a) kurikulum itu ditujukan untuk “mencetak” kader ulama dikemudian hari; (b) struktur dasar kurikulum itu adalah pengajaran pengetahuan agama dan pemberian pendidikan dalam bentuk bimbingan kepada santri secara pribadi oleh kiyai/gurunya; dan (c) secara keseluruhan kurikulum yang ada berwatak lentur/fleksibel (Wahid, 2001b: 109).

Rekonstruksi kurikulum di pesantren yang memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman dalam kehidupan modern ini, menurut Abdurrahman Wahid harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang (Wahid, 2001b: 117). Kurikulum pesantren memuat sistem nilai unik pesantren yang termaktub di dalam kitab kuning. Sistem nilai unik yang dipelihara di pesantren menjadi salah satu aspek kehidupan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang membentuk subkultur tersendiri (Wahid, t.t.: 73-74).

Pesantren dengan sistem nilainya yang mengutamakan peribadatan dan penghormatan kepada guru menjadi salah satu aspek dinamis subkultur lembaga pendidikan tradisional di pesantren. Oleh karena itu, memelihara sistem nilai ini berarti memelihara subkultur pesantren. Selanjutnya, memelihara subkultur pesantren menunjukkan kemampuan pesantren memelihara kelebihan pendidikan tradisional di dalamnya

. Dengan demikian, pesantren merupakan pantulan kehidupan yang diidealisir dan diidamkan oleh masyarakat dalam keadaan transisional (Wahid, t.t.: 74-75).

Tata nilai kehidupan pesantren menjwai peranan kepemimpinan informal kiai pesantren sebagaimana ditunjukkan dalam pembangunan. Pembangunan bisa saja menafikan urgensi peranan pranata-pranata tradisional, akan tetapi pembangunan tidak dapat mengelakkan diri dari pengaruh perkembangan pranata-pranata tersebut. Pesantren sebagai salah satu pranata tradisional yang bergerak di bidang pendidikan memiliki pengaruh tidak kecil terhadap pembangunan. Peranan tersebut khususnya berbentuk pembudayaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat terutama di lingkungan pedesaan.

Selanjutnya Abdurrahman Wahid (dalam Wahid, Suwendi, Zuhri [eds.], 1999: 17-18) menegaskan bahwa keunikan sistem nilai pesantren memainkan peranan penting bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai yang dibangun pesantren bertumpu pada ajaran-ajaran agama yang telah berkembang selama berabad-abad. Kerangka sistem nilai pesantren yang diderivasi dari doktrin-doktrin barakah merupakan pancaran dari kiai dan santri. Kepercayaan bahwa pengawasan kiai pada santri akan memudahkan penguasaan ilmu-ilmu agama yang benar merupakan dasar dari sistem nilai ini. Perombakan sistem nilai yang telah dibangun pesantren selama berabad-abad dapat menghancurkan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional dan subkultur. Melalui sistem nilai itulah, kelebihan lembaga tradisional di pesantren ditemukan. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid menegaskan signifikansi pelestarian nilai-nilai pesantren tersebut (Wahid, t.t.: 77).

Penulis berpendapat bahwa gagasan Abdurrahman Wahid tentang pengembangan pesantren melalui dinamisasi pesantren sebenarnya merupakan upaya penyadaran komunitas pesantren sendiri untuk menelusuri kembali kekuatan nilai-nilai universal yang dianut, dipelihara, dan diwariskan pesantren lewat pendidikannya selama ini. Ketidakpahaman terhadap nilai-nilai universal pesantren berakibat hilangnya salah satu ciri khusus pesantren yang telah menopang kehidupan pesantren selama berabad-abad lamanya sehingga menjadikan pesantren tetap eksis sampai sekarang ini.

Gagasan Abdurrahman Wahid ini juga dapat dipahami sebagai kritik tajamnya atas sikap acuh tak acuh pesantren terhadap sistem nilai universal yang ada di dalamnya akan tetapi keberadaannya seolah-olah tidak mampu dipahami bahkan dibaca oleh kalangan pesantren sendiri. Akibatnya, tidak ada upaya dari kalangan pesantren melihat fungsi dan peran nilai universalnya tersebut untuk pengembangan pesantren ke depan, dan dalam jangka pendek untuk merepons modernisasi (pembangunan).

Melalui dinamisasi pesantren, dia menghendaki terjadinya perubahan pesantren ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, pada saat yang sama perubahan tersebut tidak menghancurkan nilai-nilai lama yang selama ini dipegang teguh oleh pesantren sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Implikasi gagasan Abdurrahman Wahid tentang pengembangan pendidikan pesantren melalui dinamisasi pesantren ini terletak pada kerangka dasar pengembangan pesantren ke depan. Kerangka dasar yang dimaksud adalah menempatkan sistem nilai pesantren pada *mainstream* pola pengembangan pesantren ke depan sehingga tidak merusak jati diri pesantren sendiri. Pengembangan pesantren yang mengabaikan sistem nilai pesantren dapat membelokkan misi utama pesantren yang telah diembannya sepanjang sejarah perkembangannya.

Pada dekade 1970-an dan 1980-an, gagasan tersebut belum sempat diimplementasikan secara luas. Gagasan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun struktur masyarakat Indonesia yang adil dan maju dengan menempatkan nilai-nilai luhur pesantren sebagai parameter. Mewujudkan struktur masyarakat Indonesia yang adil dan maju (baca: modern) inilah menurut Syaiful Arif –santri Abdurrahman Wahid di Pesantren Ciganjur– (Wawancara, 11 Mei 2014) menjadi muara dari pemikiran dan gerakan yang diusung oleh Abdurrahman Wahid. Menurut Arif (Wawancara, 11 Mei 2014), Pesantren Ciganjur merupakan upaya konkret Abdurrahman Wahid dalam merealisasikan gagasan tentang pengembangan pendidikan pesantren yang dicita-citakannya. Namun demikian, karena kesibukan-kesibukannya dalam melakukan kerja-kerja pengembangan *civil society* lainnya menjadikan gagasannya tersebut belum sempat diimplementasikan secara komprehensif. Akan tetapi, hal ini bukan berarti dia tidak konsisten memperjuangkan gagasannya tersebut.

Gagasan Abdurrahman Wahid ini sering dipandang “melampaui” zamannya sehingga banyak kalangan (termasuk pesantren sendiri) belum mampu memahami makna substansial dari gagasan tersebut. Faktor inilah yang menjadikan gagasan tersebut belum sempat direalisasikan secara optimal pada dekade 1970-an dan 1980-an. Mengacu pada dua faktor inilah, penulis berpendapat bahwa gagasan Abdurrahman Wahid tentang pengembangan pendidikan pesantren ini sesungguhnya “membumi”, tidak “melangit”.

Menurut informasi dari KH. Muhammad Musthofa selaku pemangku Pesantren Ciganjur (Wawancara, 29 Mei 2014), pada awalnya Abdurrahman Wahid bercita-cita menjadikan Pesantren Ciganjur sebagai Pusat Kajian Agama-Agama se-Dunia. Namun, cita-cita tersebut bergeser sejak awal dekade 2000-an menjadi Pusat Kajian Islam Tradisional (lihat juga *Laporan Ramadhan 2007 Pesantren Ciganjur*, 2007: 3). Pergeseran ini menurut Abdurrahman Wahid sebagaimana dituturkan oleh KH. Muhammad Mustofa disebabkan salah satunya oleh keterbatasan *human resources* kader yang dimilikinya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Arief Rachman Hamid (Wawancara, 3 Juni 2014), Abdurrahman Wahid mempunyai dua obsesi besar terhadap Pesantren Ciganjur ke depan. Pertama, dia ingin menjadikan Pesantren Ciganjur sebagai “Pesantren Luhur”. Kedua, dia ingin menjadikan Pesantren Ciganjur sebagai pusat database kitab-kitab klasik Islam dari berbagai penjuru dunia dan sebagai pusat kajian agama-agama yang beragam. KH. Wahid Maryanto (Wawancara, 29 Mei 2014) menjelaskan bahwa Abdurrahman Wahid bercita-cita Pesantren Ciganjur menjadi refleksi dari “wajah” Islam Indonesia.

C. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Fenomena ketidakmampuan pesantren dalam menghadapi kekuasaan Orde Baru melahirkan tekad untuk mengangkat eksistensi pesantren dalam publik yang lebih luas. Kebijakan-kebijakan rezim yang tidak pro pesantren justru memicu munculnya pemikiran kreatif seputar pesantren. Represivitas politik dan

marjinalisasi sistemik terhadap pesantren yang dilakukan rezim Orde Baru pada dekade 1970-an dan 1980-an menjadi faktor pendorong lahirnya gagasan pengembangan pendidikan pesantren. Sementara itu, manifestasi umum dari kondisi pesantren yang stagnan dan memprihatinkan merupakan faktor internal yang dihadapi oleh pesantren pada waktu itu. Untuk merubah kondisi pesantren seperti itu, gagasan inovatif berupa dinamisasi pesantren diperkenalkan.

2. Menurut Abdurrahman Wahid pesantren memiliki fungsi dasar sebagai lembaga pendidikan Islam. Sedangkan fungsi tambahan pesantren adalah sebagai sarana informasi. Meskipun fungsi kedua pesantren ini bersifat tambahan, akan tetapi fungsi ini menjadi pelengkap yang penting bagi fungsi pertama. Dengan kata lain, kedua fungsi pesantren tersebut bersifat *integrated* dan *interdependent*. Fungsi-fungsi pesantren tersebut mencerminkan watak mandiri yang dimiliki oleh pesantren. Fungsi tambahan pesantren terkait erat dengan fungsi kemasyarakatan pesantren sebagai subkultur. Dia juga berpendapat bahwa pesantren dapat dipahami dari dua sudut pandang, yakni dari fungsi pendidikan dan fungsi kemasyarakatan.
3. Kerangka pengembangan pesantren dalam pemikiran Abdurrahman Wahid tidak dimaknai sebagai pengembangan pesantren yang mencerabut akar tradisinya. Pengembangan pesantren harus bertumpu pada prinsip yang telah lama dipegangi oleh pesantren, yaitu:

المحافظة على القديم الصالح و الاخذ بالجديد الاصلح

Bagi Abdurrahman Wahid, pesantren sebagai representasi institusi pendidikan Islam tradisional harus mampu memadukan sesuatu yang tradisional dan modern, bukannya membuang sesuatu yang tradisional dan menggantikannya dengan sesuatu yang modern. Pemikirannya inilah tampaknya memberikan harapan yang lebih prospektif bagi kalangan pesantren dalam mengimplementasikan gagasan pengembangan pendidikan pesantren melalui dinamisasi pesantren sebagaimana dapat dipahami dari kerangka umum pengembangan pendidikan pesantren yang diperkenalkannya.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad, Munawar, 2010, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS.
- Ali, As'ad Said, 2008, *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*, Jakarta: LP3ES.
- Ali, A. Mukti, "Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Bangsa", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, No.2, Volume I, April, Mei, Juni 1991.
- Ali, Mohamad, 1985, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru.
- Amin, Samsul Munir, 2010, *KH. Muntaha al-Hafizh Pecinta Al-Qur'an Sepanjang Hayat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Arif, Syaiful, 2009, *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif Sebuah Biografi Intelektual*, Depok: Koekoesan.
- Arifin, H.M., t.t., *Kapita Selecta Pendidikan (Umum dan Agama)*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Barton, Greg, 2004, *Biografi Gus Dur*, terjemahan Lie Hua, Yogyakarta: LKiS.
- Ba'albaki, Munir, 1995, *Al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, Beirut-Lebanon: Dar el-Ilm lil-Malayan.
- Bush, Tony, dan Marianne Coleman, 2010, *Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*, terjemahan Fahrurrozi, Jogjakarta: IRCiSoD.
- Ember, Carol R., dan Melvin Ember, "Konsep Kebudayaan", dalam T.O. Ihromi (ed), 1987, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: PT Gramedia.
- Fakih, Mansour, 2010a, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: INSISTPress.
- _____, 2010b, *Bebas dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: INSISTPress.

- Gadamer, Hans-Georg, 2010, *Kebenaran dan Metode Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terjemahan Ahmad Sahidah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Ali dan Mukti Ali, 2003, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hasan, Syamsul A., 2009, *Kharisma Kiai As'ad di Mata Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Iskandar, A. Muhaimin, 2007, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia*, Yogyakarta: KLIK. R.
- Koentjaraningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2007, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UIP Press.
- Lukens-Bull, Ronald Alan, 1997, *A Peaceful Jihad Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction*, USA: Arizona State University.
- Mahfudh, K.H. MA. Sahal, 2007, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS.
- Mochtar, H. Affandi, 2009, *Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantren*, Bekasi: Pustaka Isfahan.
- Nakosteen, Mehdi, 1995, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, terjemahan Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasution, S., 2009, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, S., 1993, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Palmer, E. Richard, 2005, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terjemahan Musnur Hery & Damanhuri Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwadi, 2007, *Dakwah Sunan Kalijaga Penyebaran Agama Islam di Jawa Berbasis Kultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raho, Bernard, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

- Rangkuti-Hasibuan, Hj. Sofia, 2002, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia Teori dan Konsep*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Ricklefs, M.C., 2008, *Sejarah Indonesia Modern 1200 - 2008*, terjemahan Tim Penerjemah Serambi, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2007, *Modern Sociological Theory*, terjemahan Alimandan, Jakarta: Kencana.
- Riyadi, Ahmad Ali, 2006, *Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Saenong, Ilham B., 2002, *Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, Jakarta: Teraju.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2000, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, Bagong, "Perkembangan dan Peran Sosiologi", dalam J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), 2007, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarbaini, Syahril dan Rusdiyanta, 2009, *Dasar-dasar Sosisologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- The Encyclopedia of Religion* 6, 1995, New York: Macmillan Library Reference.
- Tilaar, H.A.R., 2000, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Upe, Ambo, 2010, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zubaedi, 2007, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Abdurrahman, "Pengantar" dalam Abdurrahman Wahid, t.t. *Bunga Rampai Pesantren Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid*, t.tp.: CV. Dharma Bhakti.

- _____, "Pesantren dan Pengembangan Watak Mandiri", dalam Abdurrahman Wahid, t.t., *Bunga Rampai Pesantren Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid*, t.tp.: CV. Dharma Bhakti.
- _____, "Manfaat Koperasi bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam", dalam Hairus Salim H.S. (Peny.), 2001b, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS.
- _____, "The Pesantren and Current Indonesian Politics", dalam Oepen, Manfred dan Wolfgang Karcher (eds.), 1988, *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*, Berlin: Fredrich-Naumann-Stiftung, Indonesian Society for Pesantren and Community development (P3M), Technical University Berlin.
- _____, "Pesantren Profil Sebuah Subkultur", dalam Tim Desantara (Peny.), 2001a, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Depok: Desantara.
- _____, "Principles of Pesantren Educaion", dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (eds.), 1988, *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*, Berlin: Fredrich-Naumann-Stiftung, Indonesian Society for Pesantren and Community development (P3M), Technical University Berlin.
- _____, "Asal-Usul Tradisi Keilmuan di Pesantren", dalam Hairus Salim H.S. (Peny.), 2001b, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS.
- _____, "Pesantren dan Pengembangan Watak Mandiri", dalam Abdurrahman Wahid, t.t., *Bunga Rampai Pesantren Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid*, t.tp.: CV. Dharma Bhakti.
- _____, Prolog: "Pondok Pesantren Masa Depan", dalam Marzuki Wahid, Suwendi, dan Saefudidin Zuhri [eds.], 1999, *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah.

- _____, "Standardisasi Sarana Ilmiah di Pondok Pesantren", dalam Abdurrahman Wahid, t.t., *Bunga Rampai Pesantren Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid*, t.tp.: CV. Dharma Bhakti.
- _____, "Pesantren sebagai Subkultur", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), 1983, *Pesantren dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES.
- _____, "Dinamisasi dan Modernisasi Pesantren", dalam Abdurrahman Wahid, t.t., *Bunga Rampai Pesantren Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid*, t.tp.: CV. Dharma Bhakti.
- _____, "Benarkah Kyai Membawa Perubahan Sosial?: Sebuah Pengantar, dalam Hiroko Horikoshi , 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- _____, "Membaca Sejarah Lama (11)", dalam M. Imam Aziz (ed.), 2010e, *Membaca Sejarah Nusantara 25 Kolom Sejarah Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS.
- _____, "Paradigma Pengembangan Masyarakat Melalui Pesantren", dalam Hairus Salim H.S. (Peny.), 2001b, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS.
- _____, "Pesantren dan Pengembangannya", dalam Abdurrahman Wahid, t.t., *Bunga Rampai Pesantren Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid*, t.tp.: CV. Dharma Bhakti.
- _____, "Pesantren dan 'Sekolah Umum'", dalam Hairus Salim H.S. (Peny.), 2001b, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS.
- _____, "Prinsip-Prinsip Pendidikan Pesantren", dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (eds.), 2007a, *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute.
- _____, "Kepemimpinan dalam Pengembangan Pesantren", dalam Abdurrahman Wahid, t.t., *Bunga Rampai Pesantren Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid*, t.tp.: CV. Dharma Bhakti.

_____, "Pendidikan Tradisional di Pesantren", dalam Abdurrahman Wahid, t.t., *Bunga Rampai Pesantren Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid*, t.tp.: CV. Dharma Bhakti.

_____, "Kurikulum Pesantren dan Penyediaan Angkatan Kerja", dalam Hairus Salim H.S. (Peny.), 2001b, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS.

Winch, Christopher, and John Gingell, 1999, *Key Concepts in The Philosophy of Education*, London: Routledge.

